

STUDI PANCASILA SEBAGAI KRISTALISASI PERADABAN BANGSA SEBAGAI TANGGAPAN TERHADAP FENOMENA RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA

Mathias Jebaru Adon

Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang
mathiasjebaruadon@gmail.com

Abstract

In the midst of the onslaught against Covid-19, Indonesia is faced with acts of religious radicalism. This has emerged in the suicide bombing in front of the Makassar Cathedral Church. This incident was allegedly an act in the name of religion. Therefore, this paper aims to reveal the crystallization of Pancasila as the soul of the Indonesian nation. The Indonesian nation was born from the compromise of the tribes in the archipelago who wanted to unite. These ideals were formulated by the founders of the Indonesian nation in the five principles of Pancasila which were extracted from the local wisdom of the Indonesian nation itself. Because of, Pancasila is the binding rope that guarantees the integrity of the Indonesian nation. Based on this, this research methodology uses a cultural historical approach with the interpretive phenomenological method of local wisdom of ethnic groups, the history of the nation's struggle to the formulation of Pancasila as the constitutive foundation of the plural Indonesian nation. Through this study, it is found that policies constitute values that can fight against all forms of radicalism, intolerance and terrorism that threaten the unity and integrity of the Indonesian nation.

Keywords: Pancasila, Local Wisdom, Terrorism and the unity of the Indonesian Nation.

Abstrak

Di tengah gempuran melawan Covid-19, Indonesia berhadapan dengan tindakan radikalisme agama. Hal ini mencuat dalam kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makasar. Peristiwa ini disinyalir sebagai tindakan atas nama agama. Berkaitan dengan hal ini, studi Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai peradaban Bangsa Indonesia mendesak untuk dijalankan. Pancasila di yakini dapat meredam segala bentuk intoleransi dan radikalisme agama yang menjadi latar belakang

tindakan terorisme. Karena itu, tulisan ini bertujuan menyingkap kristalisasi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir dari kompromi suku-suku di nusantara yang ingin bersatu. Cita-cita ini dirumuskan oleh pendiri bangsa Indonesia dalam lima sila Pancasila yang digali dari kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab, Pancasila menjadi tali pengikat yang menjamin keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan historis cultural dengan metode fenomenologi interpretatif kearifan lokal suku-suku bangsa, sejarah perjuangan bangsa hingga perumusan Pancasila sebagai landasan konstitutif bangsa Indonesia yang plural. Melalui studi ini ditemukan kebijaksanaan yang merupakan nilai-nilai yang dapat melawan segala bentuk tindakan radikalisme, intoleransi dan terorisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Kearifan Lokal, Terorisme dan persatuan Bangsa Indonesia.

Article History: Received 11 September 2021, Revised: 04 October 2021, Accepted: 30 November 2021, Available online 01 December 2021

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, beraneka macam budaya, etnis, agama dan ras. Semuanya menjadi satu satu dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam falsafah negara Pancasila. Pluralitas bangsa Indonesia ini menjadi persoalan yang amat serius dalam sejarah perjalanan NKRI. Di masa pandemi Covid-19, studi Pancasila sebagai kristalisasi peradaban Bangsa Indonesia menarik untuk dikaji. Di masa sulit ini karena tekanan ekonomi dan sosial akibat pembatasan sosial yang berkepanjangan sehingga menghambat laju perekonomian mengakibatkan ketimpangan dalam hidup bersama sebagai satu bangsa dan negara. Di beberapa tempat marak terjadi politik identitas yang ditandai dengan meningkatnya ujaran kebencian, intoleransi beragama, radikalisme, terorisme, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (PGI-KWI, 2020). Masalah ini mencuat secara khusus dalam peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu

(28/3/2021). Banyak pihak yang menilai bahwa bom bunuh diri tersebut telah merusak kesatuan dan persatuan NKRI. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat Rafani Achyar sebagaimana yang dilansir detik.com mengatakan, tindakan bom bunuh diri tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan persatuan bangsa Indonesia, serta telah merusak kerukunan antar umat beragama yang telah digalakkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia (Putra, 2021). Padahal, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu ketika gugusan pulau di antara dua Samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan dua Benua (Benua Asia dan benua Australia) bertekad menyatukan diri membentuk negara kesatuan yakni, Indonesia merdeka.

Perasaan senasib-sepenanggungan, sebangsa dan setanah air yang memenuhi hati putra-putri Indonesia pada waktu itu menjadi latar belakang semangat persatuan suku-suku di nusantara. Anak-anak bangsa ini merasa berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami penderitaan yang sama akibat penjajahan bangsa asing. Semangat kesatuan ini diwujudkan dalam cita-cita mempersatukan negara tumpah darah Indonesia yang melampui golongan dan paham perseorangan. Para putra-putri bangsa ini menghendaki agar Negara Indonesia yang dibangun adalah negara yang berasaskan kekeluargaan, tolong-menolong dan yang mengutamakan kedamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh tanah tumpah darah Indonesia (Hanafi, 2018). Karakter kearifan inilah yang kemudian menjadi roh dan fondasi dasar Pancasila. Bung Karno sendiri kerap kali berkata, Pancasila sudah ada ribuan tahun yang lalu dalam tradisi warisan nenek moyang yang berciri karakter kearifan tentang bagaimana kesatuan dan persatuan suatu suku bangsa dijaga dan dirawat (Riyanto, 2015). Paham persatuan *Ain Ni Ain* orang Kei misalnya dapat menjadi salah satu gambaran bagaimana kearifan lokal menjadi landasan historis konsep persatuan Pancasila. Orang Kei memiliki kearifan yang

memandang orang lain di luar anggota keluarganya sebagai satu keluarga kekerabatan. Dengan kearifan ini, orang Kei mengintegrasikan semua orang ke dalam satu jaringan relasi kekeluargaan. Bagi orang Kei, keluarga tidak hanya keluarga batih (ayah-ibu dan anak) tetapi maknanya lebih luas, yang berlaku tidak hanya dalam perjumpaan dengan orang-orang yang ada di Pulau Kei saja tetapi juga dalam pertemuan dengan orang-orang Kei di negeri rantau diakui sebuah pertemuan keluarga (Ohoitumur, 2015). Meski pertemuan ini secara *de facto* adalah pertemuan individu-individu yang belum tentu memiliki pertalian darah. Tetapi dengan paham kearifan *Ain Ni Ain*, mereka langsung melacak asal usul familial seseorang sehingga dapat menyapanya sebagai “bapa”, “mama”, “om” atau “tante” yang menunjukkan hubungan persahabatan (Ohoitumur, 2015).

Dengan demikian studi tentang pemikiran pancasila memiliki cakupan yang luas dan dalam, sedalam dan seluas jiwa bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Maroke. Meski perasaan kebangsaan yang satu dari berbagai suku bangsa ini menjadi perdebatan yang serius, terjadi tarik ulur dalam menemukan bentuk dan dasar negara yang tepat ketika hendak mendirikan negara Indonesia merdeka. Diskusi ini nampak jelas dalam sidang Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam usaha menemukan bentuk dan dasar yang tepat dan kokoh bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam sidang itu dikemukakan bahwa dasar negara Indonesia harus mempunyai akar yang dalam pada kegotongroyongan masyarakat Indonesia (Soekarno), lembaga sosial (struktur sosial) dari masyarakat asli bangsa Indonesia sendiri (Soepomo), dan dari sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di nusantara (Yamin). Penemuan para *founding fathers* ini dirumuskan secara apik oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yang terangkum dengan sangat indah dalam 5 sila: Kebangsaan, Internasionalisme atau

Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan yang Berkebudayaan (Soekarno, 1995). Soekarno mengakui bahwa kelima sila itu ia angkat dari prinsip hidup yang terkandung dalam kearifan bangsa Indonesia sendiri yang mengejawantah dalam hidup masyarakat Indonesia (Soekarno, 2006). Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam ke-5 sila tersebut tidak beku dalam rumusan dalil-dalil yang indah tetapi hidup dalam hati dan sanubari rakyat Indonesia sebagai produk pengalaman, pergulatan dan kedalaman relasinya dengan sesama. Di dalam sila-sila itu tercakup konsep-konsep tentang *Liyan* (orang asing), alam, yang ilahi dan kebijaksanaan lainnya. Karena itu keseharian hidup manusia Indonesia menjadi semacam lapangan nilai-nilai yang hidup dari Pancasila.

Dengan kata lain, semangat kesatuan Indonesia sudah tumbuh dalam semangat kebatinan bangsa Indonesia sendiri selama berabad-abad dalam sejarah peradaban, hidup ketatanegaraan, kegotongroyongan dan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, Pancasila merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam usahanya mencapai kemerdekaan dan sekaligus menjadi dasar kebangsaan Indonesia yang plural. Karena itu fokus penelitian tulisan ini lebih menekankan pada proses terjadinya Pancasila dari Pancasila material yaitu, esensi dan nilai-nilai Pancasila yang didasarkan pada landasan historis-kultural menjadi rumusan formal bagi pedoman operasional dan pandangan filosofis Negara Indonesia sehingga menjadi landasan yang hidup bagi bangsa dan negara Indonesia. Kekhasan studi penelitian ini terletak pada pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam menganalisis sejarah terbentuknya Pancasila. Mulai dari proses perumusan, penerapan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Filsafat fenomenologi menyumbang interpretasi yang kebenarannya tidak difondasikan pada teks-teks atau prinsip-prinsip yang diperoleh dari proses penalaran deduktif, melainkan pada pengalaman konkret subyek yang terlibat. Kebenaran itu

misalnya dalam cita rasa kearifan gotong royong budaya undang *haep* dalam upacara kematian Suku Helong di Pulau Semau, Kupang-NTT. Secara fenomenologi kebijaksanaan upacara undang *haep* tidak ditumpukan pada naskah kuno melainkan dari penghayatan hidup sehari-hari masyarakat suku Helong. Demikian juga dengan interpretasi studi Pancasila sebagai kristalisasi peradaban Bangsa Indonesia tidak beku dalam rumusan-rumusan dan dalil-dalil kalimat yang indah di buku-buku perpustakaan atau dalam pemikiran dan otak para cendekiawan dan politikus, tetapi pada pengalaman konkret hidup bersama masyarakat lokal Indonesia. Perspektif fenomenologis mengajari kita bahwa, nilai-nilai hidup manusia merupakan produk pergulatan pengalamannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Informasi dan data secara mendalam digali melalui berbagai literatur, buku, majalah, jurnal dan berbagai referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan guna memperoleh hasil dan jawaban yang sesuai dengan fokus studi penelitian ini (Yaniawati, 2020). Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari pidato para *founding father* bangsa Indonesia yang termuat dalam Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945 (1995), tulisan-tulisan Soekarno seperti: Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila (2017), Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (2006) dan dalam jurnal studi-studi kearifan lokal. Sumber-sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berisi interpretasi hermeunitis Pancasila, serta koran dan majalah yang relevan termasuk di dalamnya pemberitaan online yang juga menyinggung pokok persoalan penelitian ini seperti, kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makasar pada 28 Maret 2021. Sumber data-data primer dianalisis dari sudut pandang fenomenologi sehingga

ditemukan benang merah Pancasila sebagai kristalisasi peradaban bangsa Indonesia yang jauh terbentang sebelum perumusannya pada momen pidato Soekarno. Kekayaan rumusan itu tersembul dalam kearifan lokal suku-suku bangsa, dan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara kesatuan Indonesia.

Studi fenomenologi menyumbang kekayaan pemahaman bahwa, nilai-nilai Pancasila dalam kenyataannya terus terhubung sampai setelah perumusannya, sehingga menjadi landasan konstitutif dan filosofi bangsa Indonesia. Pada zaman milenial studi Pancasila dari sudut pandang fenomenologi sangat urgent untuk dijalankan sebagai tanggapan terhadap munculnya ideologi-ideologi asing yang merusak kesatuan NKRI. Disinyalir bahwa akhir-akhir ini fenomena intoleransi, radikalisme dan fanatisme agama semakin marak terjadi di tanah air. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama studi penelitian ini untuk menangkal segala bentuk radikalisme agama yang menjadi cikal bakal lahirnya tindakan terorisme. Sebab segala bentuk paham dan sikap primordialisme yang mengeksklusifkan kebudayaan dan keyakinan kelompok sendiri di atas keyakinan orang lain hanya dapat diatasi melalui studi mendalam dan berkesinambungan tentang Pancasila. Hal ini penting disadari karena bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang sangat inklusif dan toleran. Pernyataan ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai macam kepercayaan keagamaan di Indonesia pada saat Indonesia memasuki zaman sejarah. Dan sekarang kearifan bangsa itu telah terkristal dalam sila-sila Pancasila. Karena itu, di tengah merebaknya tindakan intoleransi dan radikalisme agama, studi Pancasila juga menjadi mendesak untuk dikerjakan.

Studi pemikiran Pancasila pada dasarnya memiliki cakupan yang lebih luas dari perumusannya pada momen pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Sebab kekayaan kearifan Pancasila membentang luas jauh sebelum perumusannya dan lebih kaya sesudah momen pidato Soekarno. Sebagaimana

dikatakan Armada Riyanto (2015), studi pemikiran Pancasila pertama-tama bukan interpretasi ide atau gagasan mengenai pengertian Pancasila tetapi lebih dimaksudkan pada studi konsep nilai-nilai luhur dari filsafat Keindonesiaan yang telah lama terpatri dalam jiwa suku-suku bangsa yang tersebar di persada nusantara (Riyanto, 2015). Dengan kata lain, studi pemikiran Pancasila tidak hendak mengatakan studi pemikiran bung Karno sebagai pencetus, tetapi lebih merujuk pada kearifan lokal yang hidup di dalam hati masyarakat Indonesia, berupa tradisi kearifan yang indah tentang bagaimana kehidupan bersama ditata dan dikelola. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Bung karno sendiri bahwa, Pancasila bukan bikinanya tetapi digali dari kebudayaan Indonesia sendiri. Berdasarkan hal tersebut, studi penelitian ini pertama-tama mengkaji dan menganalisis Pancasila sebagai kristalisasi peradaban bangsa Indonesia. Hal ini nampak dalam kesesuaian terminologi yang dipakai Soekarno dalam perumusan Pancasila yang secitra dengan filsafat Keindonesiaan. Untuk memperkaya dan mendukung fokus studi penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah digarap oleh para pemerhati dan pakar Pancasila seperti Kaelan yang menulis *Negara Kebangsaan Pancasila* (2013), Poespowardojo yang menulis *Pancasila Dari Pendekatan Sosio Budaya* (1989), Armada Riyanto bersama para Filosof Kristen di Indonesia yang meneliti kearifan lokal nusantara sebagai butir-butir filsafat Keindonesiaan (2015) dan beberapa peneliti dan pakar yang memberi aksentuasi pada penggalian Pancasila sebagai hasil pembudayaan kearifan lokal. Kedua, studi ini meneliti latar belakang landasan historis-kultural Pancasila sebagai tali perekat persatuan Bangsa. Studi ini menemukan bahwa kesatuan bangsa Indonesia memiliki latar belakang historis sejak zaman-zaman kerajaan di Indonesia berupa penguasaan wilayah teritorial seperti Indonesia dewasa ini, baik penguasaan secara politik maupun ekonomi. Dan ini tampak dalam studi yang dilakukan Reksosusilo yang menulis *Filsafat*

Nusantara (2007) dan Pidato-pidato para pendiri bangsa; Muhamad Yamin, Soepomo dan Soekarno dalam *Sidang BPUPKI 28 Mei-22 Agustus 1945* dan beberapa peneliti seperti; Suwarna yang menulis *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (1993) serta dalam studi yang dilakukan oleh Nurrohim (2020) dan Pradhani (2017) yang mengemukakan persatuan bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Ketiga, semangat kesatuan suku-suku bangsa bertumbuh secara kuat dan kentara pada zaman kolonialisme. Pada masa ini rakyat Indonesia telah membulatkan hati dan bertekad untuk membentuk Negara Indonesia yang Merdeka dengan mengejar pendidikan yang setara dengan orang barat. Pada masa itu timbul rasa kebangsaan, senasib dan sepenanggungan karena sama-sama dijajah. Kesadaran ini diperkuat dengan kesadaran bahwa bangsa Asia tidak kalah bersaing dengan orang Barat. Hal inilah yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional seperti Budi Oetomo yang pada awalnya bergerak dalam bidang pendidikan kemudian beralih ke sosial politik. Hal ini tampak dalam studi yang dilakukan Yasmis (2008) dan Reksosusilo (2007). Karena itu, Pancasila menjadi landasan konstitutif Bangsa Indonesia dan sumber hukum dari hukum di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjadi tali pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam sebab ia lahir dari cita-cita luhur bangsa yang ingin bersatu. Keempat, studi penelitian ini akan menguraikan urgenitas studi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketika nilai-nilai Pancasila dikesampingkan maka akan terjadi ketimpangan dalam hidup bersama. Munculnya aksi terorisme, intoleransi dan radikalisme dalam hidup beragama merupakan bukti yang paling jelas hilangnya semangat Pancasila dari dalam diri bangsa Indonesia. Penelitian ini menyadarkan kita bahwa studi tentang nilai-nilai Pancasila mesti senantiasa digalakkan agar dapat menangkal segala macam ideologi asing yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila telah terbukti mampu

meredam segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang membahayakan kehidupan bersama.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Indonesia

Dalam pidato yang dipatenkan sebagai pidato kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dan di hadapan sidang BPUPKI Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* (Soekarno, 2007). *Philosophische Grondslag* adalah jiwa dan hasrat yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia itu sendiri (Riyanto, 2015). Jiwa dan hasrat sedalam-dalamnya itu memiliki pengertian keluasan alam pikiran bangsa Indonesia dan kedalaman jiwa bangsa Indonesia. Bung Karno sendiri selalu mengatakan bahwa Pancasila digali dari budaya dan nilai-nilai kearifan rakyat nusantara yang dimiliki setiap suku bangsa yang merupakan tradisi dan warisan leluhur. Karena itu Soekarno menempatkan diri sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia yang ingin bersatu (Sulastomo, 2014). Dengan kata lain perumusan Pancasila memiliki fondasi, filsafat dan alam pemikiran rakyat Indonesia yang terkristal dalam tradisi historis-kultural-religius-sosial baik dalam wujud kebudayaan-kebudayaan elit maupun dalam kearifan kebudayaan lokal di wilayah-wilayah pinggiran kepulauan nusantara yang terpencil, miskin, pedalaman, dan dalam suku-suku yang tinggal di hutan-hutan belantara. Secara khusus dalam kebijaksanaan bagaimana suatu suku daerah mengungkapkan kedalaman relasinya dengan alam, serta kearifan dalam mengolah tata hidup bersama sebagai satu kelompok masyarakat.

Kearifan itu berkaitan erat dengan cara pandang masyarakat suatu daerah dalam memperlakukan alam seperti dalam kebijaksanaan menghargai *punden*, sumber mata air, laut, hutan ataupun gunung, serta bagaimana kehidupan sosial diatur dan dikelola. Cara suatu kelompok masyarakat memperlakukan alam dan dunia di sekitarnya mengungkapkan

kedalaman dan keluasan filsafatnya. Ketika suatu kelompok masyarakat telah sampai suatu tahap yang lebih tinggi dalam memperlakukan alam dan sesamanya maka kelompok masyarakat bersangkutan akan menjadikan kebiasaan tersebut sebagai pola hidup yang diwariskan antar generasi dalam bentuk mitos, legenda, epos, cerita rakyat dan dalam aturan dan ungkapan-ungkapan yang khas di setiap daerah. Dengan demikian cerita rakyat dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat melukiskan cara pandang dan konsep serta filsafat masyarakat bersangkutan dalam memperlakukan alam dan sesamanya. Nilai-nilai ini merupakan produk beribu-ribu tahun yang lalu bahkan jauh sebelum kedatangan agama Hindu, Buddha, Islam dan Kristen serta agama-agama lain. Hal ini menunjukkan kebenaran bahwa kearifan tersebut bersifat inklusif (menyambut, membuka diri) dan kontekstual (selaras dengan konteks hidup manusia setempat) dan tidak beku secara doktrinal maupun dogmatis (Riyanto, 2015). Dengan demikian, adat istiadat, kebudayaan lokal serta nilai-nilai religius menjadi asal dan sumber nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu melekat dan tersembul dalam tradisi hidup manusia Indonesia sehari-hari, dalam relasinya dengan Tuhan, sesama dan alam sekitarnya. Kedalaman relasi itu teramalkan dalam pengertian orang Indonesia tentang kesatuan yang dihayati dan dihidupi, dalam kebersamaan yang ditata oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam gambaran yang Ilahi diwujudkan dalam mitos, kepercayaan lokal dan tradisi-tradisi religius yang lain. Semuanya diangkat dan dirumuskan secara formal oleh pendiri negara Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia (Kaelan, 2013). Tradisi religius itu misalnya tampak dalam ritual siraman *Sedudo* yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali yakni pada bulan *Suro* pada tanggal 1 kalender Jawa atau pada bulan Muharram dalam kalender Islam (Sasmita, 2018). Tradisi siraman ini merupakan wujud pelestarian nilai-nilai sosial desa Ngliman Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Kearifan lokal yang menjadi fondasi Pancasila karenanya merupakan produk yang melukiskan kedalaman batin manusia Indonesia, keluasan relasionalitasnya serta keluhuran rasionalitasnya. Soekarno sendiri bahkan mengklaim bahwa Pancasila telah ia gali dari bumi kebudayaan nusantara era pra-Hindu-Budha sehingga ia menyebut Pancasila sebagai “Pengangkatan lebih tinggi suatu filsafat nusantara” (Arif, 2016). Artinya Pancasila merupakan pembudayaan bangsa Indonesia sendiri dari zaman lampau; baik berupa bangunan fisik maupun ilmu pengetahuan: tentang masalah-masalah sosial, filsafat dan seni yang dihasilkan oleh manusia Indonesia sejak tahun 400 M dalam pimpinan raja-raja Kutai di Kalimantan, Sriwijaya di Sumatera, Majapahit dan Mataram di Jawa. Kemudian kearifan rakyat Indonesia di bawah ikatan persatuan dan kesatuan mekanis dari pemerintahan birokrasi kerajaan Belanda (Suwarna, 1993). Pancasila merupakan mutiara kebijaksanaan yang terpendam dari Bumi nusantara dan jasa Soekarnolah yang telah menggali dan mempersembahkannya kepada Indonesia. Pancasila menjadi isi, jiwa dan intisari peradaban Indonesia selama ribuan tahun. Lima mutiara cemerlang itu yang karena penjajahan asing selama 350 tahun terbenam kembali di dalam bumi Indonesia (Arif, 2016). Tetapi seiring dengan kerasnya tindasan itu muncullah keinginan untuk mengangkatnya ke atas dengan peralatan konsep dan metode ilmiah yang diperoleh oleh sekelompok orang Indonesia yang sempat mendapat pendidikan Belanda menjadi cita-cita yang padat dan jelas sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Pancasila (Suwarna, 1993). Semua itu mengesankan bahwa para pendiri bangsa ini mampu berpikir jauh ke depan mendahului zamannya sehingga menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia yang kerap kali bergolak dengan perubahan-perubahan zaman (Sulastomo, 2014). Setelah Indonesia merdeka kelompok intelektual yang menduduki posisi strategis dalam kehidupan negara berusaha membudayakan masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila yang sudah diidentifikasi dan diidealisasikan dengan

kebudayaan Indonesia sendiri. Sebab membudayakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat menjadi jaminan bagi berdiri tegaknya NKRI yang tercinta. Kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila tercermin dalam slogan, “saya Indonesia, saya Pancasila”. Slogan ini menguat pada periode pertama kepemimpinan Jokowi sebagai tanggapan terhadap semakin maraknya aksi intoleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk kembali ke Pancasila sebagai landasan dan arahan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (Silalahi and Yuwono, 2018).

Berkaitan dengan hal ini, Kaelan (2013) mengatakan, untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia mutlak diperlukan pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan dalam membentuk NKRI yang dilandaskan atas asas hidup bersama (Kaelan, 2013). Tujuannya agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran bahwa pandangan hidup Negara Indonesia pertama-tama bersumber pada asas kultural yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, bukan pada produk luar negeri yang diimpor lalu dijadikan dasar hidup. Secara kultural dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila bertumpu pada kultur bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai ini secara fragmentaris dan sporadis terdapat dalam kebudayaan nusantara, baik pada abad-abad sebelumnya maupun pada abad kedua puluh di mana masyarakat Indonesia mampu berkomunikasi dan berinkulturasi dengan kebudayaan lain (Poespowardojo, 1989). Dengan demikian, Pancasila mencerminkan nilai-nilai pembudayaan masyarakat nusantara dari zaman kuno sampai tahun 1945 di mana nilai-nilai itu dirumuskan secara formal kemudian dijadikan dasar falsafah, sumber hukum dari sumber hukum dan ideologi dari negara Indonesia. Karena itu, kelima nilai Pancasila merupakan buah-buah nilai yang lahir dari rahim bangsa Indonesia sendiri yang bertebaran di persada nusantara. Hal ini berarti keluasan dan kedalaman Pancasila bersumber dari alam pikiran dan jiwa

bangsa Indonesia sendiri yang berlangsung sejak zaman terbentuknya suku-suku bangsa, lalu pada zaman kerajaan-kerajaan nasional sebelum datangnya bangsa-bangsa penjajah dan zaman pergerakan nasional serta awal kemerdekaan Indonesia. Berikut ini gambaran periodisasi sejarah lahirnya Pancasila sejak zaman suku-suku bangsa hingga proses pembentukan formal Pancasila sebagai dasar konstitutif bangsa Indonesia yang plural;

Zaman Suku-suku Bangsa

Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa semangat kebangsaan Indonesia sudah terkandung dalam budaya luhur suku-suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Suku-suku ini memiliki sejarah, pandangan hidup, adat istiadat, bahasa, agama dan karakter yang berbeda-beda. Kekhasan dan keanekaragaman ini merupakan produk relasinya dengan tempat di mana ia tumbuh dan berkembang. Misalnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan tanah yang diatur agar semua orang mendapat bagian. Suatu bentuk kearifan yang mencegah monopoli orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu agar semua bisa memiliki semua, sehingga tidak ada yang berkekurangan dan jangan sampai satu atau beberapa orang yang mendominasi (Riyanto, 2015). Suku-suku bangsa ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya sangat kompak, guyub, rukun dan hidup dalam semangat kekeluargaan. Umumnya mereka bergotongroyong bila ada suatu pekerjaan berat yang tidak bisa dikerjakan sendiri (Mikhael, 2014). Misalnya kearifan yang mengatur bagaimana membangun rumah secara gotong-royong, membuka kebun baru, menguburkan orang mati dan menyelenggarakan perkawinan. Semangat gotong royong ini salah satunya dihayati oleh suku bangsa Helong di Pulau Semau, Kupang-NTT dalam budaya Undang (*haep*) pada upacara kematian. Ketika ada anggota masyarakat yang meninggal suku Helong dengan segera mengambil bagian secara penuh dalam persiapan pembuatan tenda duka, penggalian liang lahat,

hingga pembuatan peti jenazah (Fanggi, 2016). Semuanya dilakukan secara sukarela sebagai bentuk partisipasi dalam meringankan beban keluarga yang berduka.

Kearifan suku-suku bangsa ini juga tampil dalam sistem pemukiman *Tanèyan Lanjháng* dalam masyarakat Madura secara khususnya di daerah Sumenep. Sistem kekerabatannya ditandai dengan pola pemukiman dan cara pekarangan rumah dibangun. Pemukiman *Tanèyan Lanjháng* diatur menurut urutan kelahiran anak perempuan dalam keluarga. Anak perempuan yang sulung menempati urutan pertama, kemudian anak perempuan kedua dan selanjutnya diatur menurut urutan yang demikian. Ciri pemukiman *Tanèyan Lanjháng* di pekarangannya terdapat rumah, dapur, kandang, dan juga seringkali terdapat sebuah Mushola (*Langghár*). Polanya, pada bagian utara rumah terdapat halaman dengan sisi depannya menghadap ke selatan (Hidayatillah, 2017). Dapur dan kandang didirikan berhadapan dengan sisi depannya menghadap ke utara, tujuannya agar suami dapat mengawasi istri dan ternaknya. Pekarangan tidak boleh mengambil banyak tempat sehingga tidak mengambil banyak lahan pertanian yang sangat diperlukan bagi hidup. Simbol pemukiman *Tanèyan Lanjháng* karenanya melukiskan semangat kegotong-royongan serta kekerabatan antara keluarga (Hidayatillah, 2017). Filosofi yang mendasarinya ialah semangat gotong royong dalam bekerja serta saling menjaga ternak dan alat kerja.

Zaman Kerajaan-Kerajaan

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M dengan ditemukannya prasasti berupa 7 Yupa (tiang batu) (Suwarna, 1993). Peninggalan 7 Yupa tersebut menurut catatan sejarah berasal dari kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur pada abad ke IV sampai abad ke V (Sihotang, 2014). Dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia antara tahun 400-1500 hanya terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi

dengan wilayah yang meliputi separuh wilayah Indonesia seperti sekarang ini yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Menurut sumber sejarah, pada akhir abad ke XII wilayah Sriwijaya meliputi daratan dan lautan Sunda, Jawa Barat sampai Srilanka termasuk di dalamnya Semenanjung Malaka dan kepulauan di sekitarnya (Suwarna, 1993). Sistem tata negara dan pemerintahan yang diterapkan Kerajaan Sriwijaya ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Persatuannya berpusat pada raja yang memiliki kekuatan militer baik di darat maupun di laut, juga memiliki kewibawaan mistis, pahlawan militer, kepala suku dan sang pemberi kemakmuran kepada rakyat (Suwarna, 1993). Sistem pemerintahan itu menarik perhatian rakyat pedalaman untuk mengumpulkan barang-barang dagangan yang ditampung di pasar-pasar lokal dan kemudian dijual ke pasar dunia lewat laut (Suwarna, 1993).

Muhammad Yamin menyebut perkembangan Sriwijaya sebagai negara Indonesia pertama dan dasar kesatuan Indonesia. Hal ini tampak dalam nilai persatuan dan ketuhanan Sriwijaya, dimana raja dipandang sebagai pusat kekuasaan. Dasar historis ini oleh Muhamad Yamin menjadi cikal bakal historis persatuan Indonesia. Selain itu, nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin dari kesetiaan dan kepatuhan daerah-daerah yang menjangkau sampai ke negeri-negeri seberang lautan menjadi dasar historis pemerintahan negara Indonesia. Dan oleh Soekarno, Sriwijaya menjadi landasan pembentukan Kesatuan Negara Republik Indonesia karena kekuasaannya terbentang hampir seluruh wilayah Sumatra dan sebagian Pulau Jawa, serta sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi kawasan Asia Tenggara (Nurrohm, 2020). Kekuasaan Sriwijaya dibangun melalui penguasaan jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan selanjutnya ke Eropa yang melewati perairan nusantara. Sriwijaya dalam membangun kekuasaannya menggunakan sistem menimbun barang untuk diperdagangkan sehingga mewajibkan kapal-kapal asing

singgah di pelabuhannya (Pradhani, 2017). Dengan cara ini raja Sriwijaya memungut bea dari perdagangan yang melewati wilayahnya. Kemampuannya dalam menguasai perdagangan di Nusantara oleh Soekarno menjadi fondasi pembentukan Negara Indonesia.

Setelah Sriwijaya, muncul kerajaan Majapahit yang berhasil memasukan kekuasaannya ke seluruh nusantara dan daerah-daerah sekitarnya. Tetapi tujuan Gajah Madah ialah kebesaran Majapahit (Jawa sentris) belum termasuk dalam pemikirannya untuk membuat seluruh daerah sebagai satu negara kesatuan seperti Indonesia dewasa ini. Kekuasaannya hanya sebatas pengakuan kekuasaan Majapahit yang ditandai dengan penerimaan upeti, dan mengutus utusan untuk mengambil barang dagangan (Reksosusilo, 2007). Dalam pelaksanaan pemerintahan, Majapahit umumnya tidak mencampuri urusan internal daerah tersebut. Hubungan yang dibangun masih hubungan dagang yang dijalin dari prinsip saling menguntungkan, bukan penguasaan daerah secara penuh. Oleh sebab itu, para pemimpin di daerah-daerah kekuasaan Majapahit masih bebas melaksanakan pemerintahannya, pemimpin daerah hanya membayar upeti untuk menyatakan kesetiaan, dan dari pihak Majapahit melalui angkatan lautnya melindungi daerah tersebut dari pihak luar (Suwarna, 1993). Dengan kata lain, Majapahit bersikap terbuka pada daerah kekuasaannya tetapi pada saat yang sama memiliki sikap yang keras terhadap pengaruh asing. Ketegasan Majapahit dengan pihak asing dibuktikan dengan kuatnya angkatan laut dan darat. Ia melakukan ekspedisi dan pengawasan terhadap negara asing yang hendak mencampuri keadaan dalam negeri Kerajaan Majapahit (Pradhani, 2017). Singkat kata dapat dikatakan bahwa, nilai dan materi yang terkandung dalam Pancasila sudah muncul sejak masyarakat nusantara memasuki zaman sejarah.

Zaman Hindia Belanda

Pada zaman Hindia Belanda sudah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini dipengaruhi oleh kelompok liberal Belanda dari kaum konservatif yang mengusulkan untuk memasukan penduduk pribumi dalam orbit budaya Belanda. Maka dilaksanakan politik etis pada abad ke-20 (Suwarna, 1993). Dengan demikian membuka kemungkinan timbulnya kelompok intelektual Indonesia yang akan merasakan, memahami dan mencari jalan keluar bagi bangsa Indonesia yang semakin jatuh di bawah himpitan bangsa Belanda. Kesadaran ini muncul ketika rakyat Indonesia yang terpelajar tahu apa yang terjadi dengan kemenangan Jepang atas Rusia, yang memberi keyakinan bahwa bangsa timur tidak kalah dengan bangsa barat (Reksosusilo, 2007). Kesadaran ini juga timbul karena orang Indonesia merasa diperlakukan berbeda dengan orang kulit putih maka mereka kemudian tergerak untuk belajar dengan mengejar pendidikan. Kedua faktor tersebut menggerakkan kelompok intelektual Indonesia untuk melakukan idealisasi atas nilai-nilai budaya pribumi dengan mengejar pendidikan. Gerakan ini pertama kali muncul di Yogyakarta dalam bentuk ide mendirikan suatu organisasi. Usaha pertama dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mendirikan organisasi modern pertama bagi bangsa Indonesia yang disebut Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Oetomo pada awalnya sebuah organisasi pergerakan yang bertujuan menghimpun beasiswa guna memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa (Yasmis, 2008). Namun seiring berjalannya waktu karena perubahan kelakuan pemerintah kolonial yang semakin bertentangan dengan politik etis, Budi Oetomo merubah tujuannya kepada pendidikan, budaya dan bahkan politik (Husda, 2017). Perubahan haluan Budi Oetomo ke bidang politik mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, baik bangsawan, pelajar maupun priyayi karena Budi Oetomo bercita-cita mewujudkan pemerintahan parlementer berasaskan kebangsaan. Mereka menuntut adanya perbaikan

dalam aturan pengadilan agar bangsa Indonesia berkedudukan sama dengan golongan penduduk lain (Yasmis, 2008).

Tjipto Mangunkusumo adalah tokoh yang mengusulkan agar Organisasi Boedi Oetomo menjadi partai politik berdasarkan “Persaudaraan nasional tanpa pandang bangsa, kelamin atau kepercayaan” (Reksosusilo, 2007). Usulan ini menunjukkan kesadaran kebangsaan yang sudah bertumbuh luas. Sementara itu di kalangan Islam muncul Serikat Dagang Islam yang dikenal Serikat Islam (SI) yang memicu timbulnya semangat nasionalisme di kalangan muslim. Namun usul untuk membentuk S.I. dalam menggalang kesatuan seluruh penduduk Netherland Indie yang anggotanya bukan hanya orang Islam saja tidak berani mereka terima karena takut dilarang pemerintah. Atas kegagalan organisasi nasional Indonesia ini, para mahasiswa di Netherland Indie mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan mendapatkan kemerdekaan Indonesia, tetapi kemudian anggota aktifnya ditangkap dan dibuang (Setiawan and Hadi, 2018). Dari peristiwa ini sudah mulai nampak jelas cita-cita kebangsaan yang mengatasi dan melampaui paham kedaerahan, lapisan sosial dan keagamaan sebagai dasar kesatuan.

Sidang BPUPKI-PPKI

Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi untuk membahas dasar negara dan kewarganegaraan, dan satu kali sidang tidak resmi untuk membahas rancangan Pembukaan UUD 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Semua sidang itu berlangsung di Jakarta sebelum kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945. Dalam sidang pertama terjadi perdebatan seputar dasar negara. Hal ini nampak jelas dalam pidato Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

1. Muhammad Yamin

Muhamad Yamin mengusulkan agar negara yang dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia yang sejajar dengan peradaban bangsa Indonesia dan menurut dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan (Yamin, 1995). Hal itu disampaikan dalam pidato tanggal 29 Mei 1945. Negara Indonesia dibentuk berdasarkan keinginan rakyat sekarang dan sebagian lagi menurut usaha masa lalu. Keinginan itu bukan hanya bersandar pada nasionalisme lama tetapi juga nasionalisme baru yang memuat konsep persatuan rakyat dalam ikatan sejarah. Negara Indonesia yang baru itu harus berasal dari peradaban bangsa Indonesia sendiri namun tidak berarti meniru-niru dasar susunan kerajaan kecil-kecil sesudah tahun 1500 sebab kerajaan-kerajaan ini tidak mempunyai batas daerah yang jelas, bentuk pemerintahan yang tetap dan penduduknya tidak berhubungan dengan kerajaan itu (Yamin, 1995). Karena itu dasar negara Indonesia yang diinginkan oleh bangsa Indonesia menurut Muhammad Yamin ialah suatu negara kebangsaan yang disusun menurut watak peradaban bangsa Indonesia sejak purbakala dan tata negara demokrasi modern. Dengan demikian dasar negara Indonesia Merdeka disusun berdasarkan adat, agama dan otak bangsa Indonesia sendiri.

2. Soepomo

Dalam rapat besar BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 di Tyuuoo Sang-In, Soepomo mengusulkan agar susunan negara Indonesia sesuai dengan struktur kebatinan bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi persatuan dan kekeluargaan (Soepomo, 1995). Hal ini sesuai dengan negara Indonesia zaman dahulu di mana pemimpin bersatu dengan rakyatnya. Hal itu dapat ditemukan dalam suasana desa di Jawa, di Sumatera dan kepulauan Indonesia lainnya. Dalam sistem desa ini, pemimpin berpegang teguh pada persatuan daerah dengan menjaga keseimbangan hidup masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dengan keinsafan keadilan yang senantiasa bermusyawarah dan bermufakat dengan rakyatnya sehingga

pertalian batin antara pemimpin dan rakyat senantiasa terpelihara (Soepomo, 1995). Dengan demikian tercipta persaudaraan, gotong royong dan semangat kekeluargaan.

3. Soekarno

Soekarno menghendaki agar dasar negara Indonesia berakar di dalam hati dan pikiran orang Indonesia sendiri. Hal itu disampaikannya dalam pidatonya 1 Juni 1945. Negara Indonesia yang didirikan bukan untuk mengagungkan satu orang, bukan juga untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan kaya atau bangsawan maupun yang dinamakan kaum Islam (Soekarno, 1995). Semua telah mufakat bahwa negara yang didirikan adalah negara “Semua buat semua” (Soekarno, 1995). Menurutnya, dasar kebangsaan menjadi fondasi utama negara, di mana setiap orang merasa bersatu dan mau bersatu karena perasaan senasib sepenanggungan. Namun perasaan kebangsaan tidaklah cukup, perlu adanya kesatuan antara orang dan tempat. Tempat yang dimaksud adalah tanah air Indonesia yang terbentang antara dua samudra dan dua benua. Maka Indonesia bukan Jawa saja, bukan Kalimantan saja tetapi kebulatan kesatuan kepulauan di nusantara. Menurutnya perasaan kebangsaan itu sudah terbentuk dalam diri bangsa Indonesia sendiri dalam rakyat Minangkabau, dalam rakyat Jogja dan lain-lain. Rakyat-rakyat ini merasa bersatu (Soekarno, 1995). Namun perasaan kebangsaan dari daerah-daerah ini hanyalah bagian kecil dari satu kesatuan bangsa Indonesia yang luas yang secara geopolitik terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian dari pidato para pendiri Bangsa Indonesia dapat disimpulkan bahwa, Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba dan diciptakan oleh seorang saja sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Tetapi Pancasila lahir melalui proses yang sangat lama dan panjang dengan tokoh pengagasnya Prof. Mohammad Yamin S.H, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Dalam perumusannya pun telah terjadi perdebatan sengit antar golongan Nasionalis, Islam, dan Komunis (Hasanah and Aan

Budianto, 2020). Dari ketiga pidato yang disampaikan itu, meskipun memiliki bobot yang sama tetapi hanya pemikiran Soekarnolah yang dianggap paling unggul dan sesuai dengan terminologi yang tepat untuk konteks Indonesia.

Landasan Konstitutif Pancasila

Landasan konstitusi Pancasila terdapat dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Soekarno, 1995). Landasan konstitutif ini memberi penegasan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang baik dan solid, karena mengandung konsepsi dasar kehidupan yang dicita-citakan dan sesuai dengan bentuk kehidupan Bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam sistem hukum, Pancasila ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum Indonesia sebab Pancasila merupakan hasil pemikiran *elektis inkorporasi* dari pendiri bangsa Indonesia (Rahayu, 2015). Karena itu, Pancasila menjadi tolok ukur yang sifatnya regulatif dan konstruktif sebab tanpa berlandaskan Pancasila maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Dengan kata lain, impian mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta terbentuknya pranata sosial politis yang baik tidak akan tercapai kalau tidak berlandaskan pada Pancasila. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan dengan jelas bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa merupakan misi pertama dan utama pembangunan bagi masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan dalam wadah NKRI (Mikhael, 2014).

Berkaitan dengan hal ini nilai-nilai Pancasila mesti terus-menerus digali sehingga mengalami transformasi yang makin

lama makin terintegrasi dengan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Ia menjadi roh yang menghidupkan bangsa, dan semangat yang menyatukan bangsa Indonesia yang bineka. Oleh sebab itu, masing-masing pihak di bumi pertiwi ini dituntut untuk berkontribusi secara bijak dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati kemajemukan (Tanamal, 2020). Sebab kesetaraan derajat kemanusiaan dan hormat pada hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup dan hak atas kemerdekaan akan diperoleh apabila hidup warga masyarakat sungguh-sungguh berasaskan Pancasila. Caranya ialah kesediaan masing-masing pihak untuk menempatkan kepentingan negara (nusa dan bangsa) di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pancasila Jati Diri Bangsa Indonesia

Keanekaragaman suku, ras, budaya, kelompok dan agama mengharuskan bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam semangat persatuan. Kesatuan kepulauan nusantara adalah satu kesatuan hukum yang mengabdikan kepentingan nasional (Reksosusilo, 2007) Hukum itu disarikan dalam Pancasila sehingga menjadi tali pengikat bangsa yang multikultural. Eksistensi negara ini terletak dalam kejeniusan para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pandangan hidup yang tepat dan baik dalam menjaga keharmonisan bangsa. Meski Pancasila dari segi politisnya merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang majemuk tetapi Pancasila telah terbukti menjadi konsensus nasional yang menjamin persatuan dan keutuhan bangsa (Poespowardojo, 1989). Karena itu, untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur maka kesatuan itu mesti dilandaskan atas kesadaran nasional yang kuat dan menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita nasional dengan cara mengesampingkan kepentingan dan tuntutan kelompok atau perseorangan. Cita-cita ini merupakan perwujudan bersama yang berkaitan erat dengan seluruh proses perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman suku-suku bangsa, hingga pemberontakan pada masa

lalu melawan imperialisme negara asing. Dalam konteks ini, arti dan makna Pancasila sebagai landasan dan pedoman baku hidup berbangsa dan bernegara senantiasa digali dan dirawat serta dijunjung tinggi.

Kerukunan antar umat beragama menjadi isu seksi yang selalu diperdebatkan dan dipersoalkan di Indonesia. Agama yang diyakini sebagai etos untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik dalam kenyataannya justru menjadi sumber konflik dan pertentangan. Munculnya radikalisme dan fundamentalisme agama merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa agama kerap kali melukai dan mencederai, secara khusus ketika agama tidak dikonfrontasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makasar membuktikan bahwa agama belum mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Ridwan Habib seorang pakar terorisme asal Universitas Indonesia sebagaimana dilansir media *Republika* 29 Maret 2021, menyebut salah satu motif pengeboman itu ialah melaksanakan keyakinan kelompoknya. Pelaku yakin dengan meninggal di tempat pengeboman adalah tindakan mulia, apalagi dilakukan pada pertengahan Sya'ban, yang berarti yang bersangkutan bisa langsung masuk surga tanpa hisab (Suryarandika, 2021).

Berhadapan dengan fenomena ekstremisme-kekerasan atas nama agama tersebut, nilai-nilai dasar Pancasila sebagai kristalisasi peradaban bangsa selama beribu-ribu tahun mesti senantiasa dikaji dan dipelajari terus-menerus, sehingga menjadi pola sikap dan pola hidup masyarakat Indonesia. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasan dalam keterangannya pada Minggu 28 Maret 2021 mengatakan, “banyaknya perangkat instrumental (peraturan) dan institusional (kelembagaan) penanganan ekstremisme-kekerasan oleh negara juga tidak menjamin terorisme hilang” (Ryiandi and Ridwan, 2021). Perhatian pemerintah pada ekstremisme dan kekerasan atas nama agama idealnya tidak

boleh berkurang. Sebab tidak jarang, aksi terorisme menjelma dalam aksi-aksi yang lebih *soft*, seperti sikap intoleransi, yang biasanya dengan cepat berubah menjadi aksi terorisme yang besar dan ganas (Suyanto, 2021). Berkaitan dengan hal ini tidaklah heran jikalau Ahok ketika menjadi wali Kota Jakarta menghendaki agar kolom agama di KTP di hapus. Menurutnya kolom tersebut seringkali membuat agama dipolitisasi dan membuat masyarakat Indonesia terbagi-bagi dalam minoritas-mayoritas (Putra, 2016). Hal ini menunjukkan meredam dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya harus diakui tidaklah mudah, sebab ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Kesulitan yang kita hadapi ialah radikalisme dan intoleransi yang menjadi cikal bakal terorisme memiliki banyak varian dan kantong-kantong gerakan keduanya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan upaya jangka panjang dalam memberantas terorisme. Hal ini dapat dimulai dengan menumbuhkan simpati di dalam hati dan pikiran para pelaku teror, orang-orang garis keras, dan siapa saja yang mulai memperlihatkan bibit-bibit intoleransi (Suyanto, 2021). Cara yang dapat ditempuh ialah melakukan studi nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dengan berbagai disiplin ilmu. Karena pada dasarnya, Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia yang sifatnya inklusif.

Studi ini penting, karena Pancasila berisi kearifan yang terbukti mampu meredam intoleransi dan sikap eksklusif suku-suku bangsa, dan telah menjadi tradisi serta warisan leluhur dari zaman ke zaman. Alasannya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah lama dijadikan sebagai pegangan dan pijakan hidup bersama. Menurut Driyarkara, “nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berpusat pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan” (Sihotang, 2014). Karena itu, Pancasila memuat aspek humanisme. Maka seluruh perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan sekaligus merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Adalah suatu tragedi dan penistaan terhadap Pancasila bila

rakyat Indonesia hidup dalam konflik, perpecahan dan intoleransi sebab itu berarti Indonesia kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang Merdeka dan bineka. Tindakan terorisme dan radikalisme agama adalah bentuk baru dari kebohongan dan kepalsuan yang disebarakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan surga dan Allah. Janji-janji kosong tersebut adalah bentuk baru dari penjajahan martabat manusia (Wijaya, 2016). Karena itu, rakyat Indonesia mesti selalu bercermin pada Pancasila. Pancasila menawarkan norma hidup, pandangan hidup dan ideologi yang mantap bagi Bangsa Indonesia. Dengan demikian kemajemukan bangsa Indonesia menjadi kekayaan dan ciri khas Indonesia di mata dunia. Karena itu, penghayatan nilai-nilai Pancasila dengan baik akan memperkuat identitas Global seseorang karena memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan segala perubahan zaman (Putri and Meinarno, 2018).

Terlepas dari semuanya itu tetap perlu disadari bahwa, kondisi plural bangsa Indonesia menyimpan efek ganda. Di satu sisi pluralitas merupakan kekayaan yang membanggakan bangsa Indonesia karena kekayaan keanekaragaman. Tetapi di sisi lain, kemajemukan ini bisa menjadi malapetaka karena menjadi sumber atau pemicu konflik yang justru bisa mengancam integritas bangsa jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Anas, 2019). Kita ingat pasca Soeharto yang ditandai oleh lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Terjadi kerusuhan di banyak daerah, disertai keinginan daerah tersebut untuk merdeka lepas dari NKRI, juga banyak bagian dari suatu provinsi ingin membentuk provinsi baru tersendiri (Ryte, 2000). Hal ini disebabkan karena ketidakadilan dirasakan di daerah-daerah. Pembangunan ekonomi yang hanya berfokus di pusat. Hal ini paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan seperti, masyarakat Kerimun yang tinggal di kepulauan Riau, dimana masyarakatnya sering berobat ke Malaysia dan merasakan kepuasan pelayanan negara tetangga tersebut. Ketidakadilan yang sama juga dirasakan oleh masyarakat

Kabupaten Malaka-NTT yang berbatasan dengan Timor Leste (Bria and Suharno, 2018). Wilayah-wilayah ini dikategorikan sebagai daerah tertinggal akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu dalam membina semangat cinta tanah air, pemerintah pertama-tama perlu memastikan pemerataan kesejahteraan di setiap daerah. Hal ini penting untuk menjaga loyalitas dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, membangkitkan dan memperkuat serta mengembangkan tali persatuan sebagai satu bangsa mesti didukung oleh pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Memang harus diakui bahwa, Bangsa Indonesia tidak akan bersih seutuhnya dari realitas konflik sebab hal ini merupakan akibat langsung dari kemajemukan. Tetapi yang perlu disadari dan diperjuangkan adalah menempatkan pluralitas sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya. Pencegahan dan peredaman konflik hanya bisa dilakukan apabila nilai-nilai Pancasila sungguh-sungguh diterima dan dihayati oleh masyarakat Indonesia. Artinya, pengakuan pluralitas bangsa Indonesia menjadi syarat mutlak bagi hidup berbangsa dan bernegara. Dan pengakuan itu mesti diejawantahkan dalam penghayatan hidup sehari-hari yang saling menerima dan menghormati kebinekaan di antara anak-anak bangsa. Cita-cita inilah yang diharapkan agar ketika bangsa Indonesia memasuki usia emas 100 tahun kemerdekaan, jiwa dan karakter Bangsa Indonesia sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran (Abi, 2017). Oleh sebab itu memasuki quarter ke empat menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia citra yang diharapkan adalah karakter anak-anak bangsa yang demokratis, nasionalis dan yang menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif (Rachman and Wahono, 2018). Sebab di atas nilai-nilai ini, kita dapat meletakkan wadas yang kokoh bagi Indonesia yang damai dan sejahtera.

Kesimpulan

Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena itu tidak jarang terjadi konflik antara suku, ras dan agama. Situasi ini mengharuskan Indonesia memiliki perekat bangsa yang merupakan hasil pembudayaan bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada dalam hidup kebatinan rakyat Indonesia, dan yang menjadi warisan bersama leluhur sebelum Indonesia secara yuridis menjadi satu negara. Warisan itu tampil dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup suku-suku bangsa di kepulauan nusantara berupa kearifan-kearifan lokal yang mengatur tata kelolah hidup bersama. Kearifan-kearifan itu merupakan nilai-nilai yang dapat dijadikan cerminan bagaimana mengatur bangsa Indonesia yang bineka. Ketika *founding fathers* menyiapkan bahan untuk menentukan dasar negara Indonesia merdeka, mereka menyadari pertanyaan pokok ini, *di atas dasar apakah Indonesia merdeka didirikan?* Mereka menemukan jawabannya dalam nilai-nilai budaya yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar rakyat Indonesia sendiri tentang kehidupan yang dianggap baik. Nilai-nilai lokal oleh pendiri bangsa disarikan kemudian dipadukan, dipadatkan dan dirumuskan dalam sidang BPUPKI-PPKI menjadi Pancasila. Nilai-nilai ini selanjutnya menjadi dasar yang kokoh bagi falsafah, sumber hukum dari segala sumber hukum serta ideologi dari NKRI sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, Pancasila menjadi corak, watak dan kekhasan bangsa Indonesia dalam mengantisipasi berbagai bentuk radikalisme dan fundamentalisme serta intoleransi agama. Dengan kata lain, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai kebijaksanaan Bangsa Indonesia yang dapat membidani lahirnya tekad dalam diri rakyat Indonesia untuk mengakui dan menghormati satu sama lain. Sehingga rakyat Indonesia dapat melihat keanekaragaman bangsa sebagai warna yang indah dan menyenangkan.

Daftar Rujukan

Abi, A. R. (2017) 'Paradigma Membangun Generasi Emas

- Indonesia Tahun 2045', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), pp. 85–90. doi: 10.17977/um019v2i22017p085.
- Anas, M. (2019) 'Menyemai Nalar Kebhinnekaan dalam Mewujudkan Pendidikan Multikultural', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), p. 128. doi: 10.17977/um019v4i1p128-139.
- Bria, M. E. and Suharno (2018) 'Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Strategi Perbatasan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 81–88.
- Fanggi, T. (2016) 'Studi Tentang Nilai – Nilai Sosial Budaya Dalam Undang (Haep) Pada Upacara Kematian', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), pp. 132–142. doi: 10.17977/um019v1i22016p132.
- Hanafi, H. (2018) 'Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 56–63. doi: 10.17977/um019v3i12018p056.
- Hasanah, U. and Aan Budianto (2020) 'Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pacasila', *Jurnal Candi*, 20(2), pp. 31–54.
- Hidayatillah, Y. (2017) 'Komparasi Nilai Keekerabatan Tanèyan Lanjhang Masyarakat Madura', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), pp. 146–153. doi: 10.17977/um019v2i22017p146.
- Husda, H. (2017) 'Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional', *Abidal*, 4(3), pp. 57–71. Available at: <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>.
- Nurrohim (2020) 'Kerajaan dan Komunitasnya: Sejarah dan Teori Keberadaan Komonitas Bahari di Masa Sriwijaya', *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 4(2), p. 133. doi: 10.29300/ttjksi.v4i2.1914.
- Ohoitimur, J. (2015) 'Ain NI Ain: Paham Persatuan Orang Kei', in Riyanto, A. et al. (eds) *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesian*. Yogyakarta: Kanisius, pp. 261–244.
- PGI-KWI (2020) 'Pesan Natal Bersama KWI PGI Tahun2020'. Jakarta: PGI-KWI, pp. 1–3.

- Pradhani, S. I. (2017) 'Sejarah hukum maritim kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam hukum Indonesia kini (The history of Sriwijaya and Majapahit maritime laws in Indonesia law today)', *Lembaran Sejarah*, 13(2), pp. 186–203.
- Putra, S. D. E. (2016) 'Kartu Tanda Penduduk Tanpa Kolom Agama Dalam Perspektif Eksistensialisme Sartre', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), pp. 126–131. doi: 10.17977/um019v1i22016p126.
- Putra, W. (2021) *Bom Bunuh Diri di Makassar , FKUB Jabar : Jangan Buat Opini Pribadi yang Memperkeruh !*, Detikcom. Available at: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5511553/bom-bunuh-diri-di-makassar-fkub-jabar-jangan-buat-opini-pribadi-yang-memperkeruh> (Accessed: 28 March 2021).
- Putri, M. A. and Meinarno, E. A. (2018) 'Relevankah Pancasila Dan Globalisasi? Mengungkap Hubungan Pancasila Dan Identitas Global', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 74–80. doi: 10.17977/um019v3i12018p074.
- Rachman, M. and Wahono, M. (2018) 'Bursa Nilai: Model Penumbuhan Nilai-Nilai Karakter Bangsa', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 89–99. doi: 10.17977/um019v3i12018p089.
- Rahayu, D. P. (2015) 'Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia', *Yustisia*, 4(1), pp. 190–202.
- Riyanto, A. (2015) *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-butir Filsafat 'Keindonesiaan'*, *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesian*. Edited by A. Riyanto et al. Yogyakarta: Kanisius.
- Ryiandi, D. and Ridwan, M. (2021) *Bom Bunuh Diri di Makassar , Ekstremisme Tetap Subur Meski Pandemi*, *Jawa Pos*. Surabaya. Available at: <https://www.jawapos.com/nasional/28/03/2021/bom-bunuh-diri-di-makassar-ekstremisme-tetap-subur-meski-pandemi/> (Accessed: 17 April 2021).
- Ryte, L. (2000) 'Violence and the State in Suharto's Indonesia', in Anderson, B. R. O. (ed.) *Pemuda Pancasila: the Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?* Cornell University Press, pp. 1689–1699. Available at:

www.journal.uta45jakarta.ac.id.

- Sasmita, W. (2018) 'Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud Pelestarian Nilai-Nilai Sosial', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), p. 207. doi: 10.17977/um019v3i2p207-214.
- Setiawan, J. and Hadi, R. S. (2018) 'Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Materi Sejarah Kebangkitan Nasional', *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(1), pp. 39–48.
- Silalahi, R. and Yuwono, U. (2018) 'Research in social sciences and technology ressat', *Research in Social Sciences and Technology*, 3(1), pp. 109–121. Available at: <https://www.learntechlib.org/p/187543/>.
- Suryarandika, R. (2021) *Menebak Motif Di Balik Bom Bunuh Diri Makassar, Harian Aceh Indonesia*. Available at: Menebak Motif Di Balik Bom Bunuh Diri Makassar (harianaceh.co.id) (Accessed: 1 April 2021).
- Suyanto, B. (2021) *Di Balik Teror Bom Makassar, Media Indonesia Selasa*.
- Tanamal, N. A. (2020) 'Pancasila Sebagai Landasan Visional bagi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Menangani Intoleransi', *Integritas: Jurnal Teologi*, 2, pp. 35–48.
- Wijaya, D. N. (2016) 'Montesquieu Dan Makna Sebuah Keadilan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), pp. 79–84. doi: 10.17977/um019v1i22016p079.
- Yaniawati, P. (2020) 'Penelitian Studi Kepustakaan', *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, (April), p. 15.
- Yasmis (2008) 'Peranan budi utomo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat', *Lontar*, 5(1), pp. 1–10.